



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

CAPAIAN TARGET KEMISKINAN EKSTREM 0%

Mohammad Teja
Analisis Legislatif Ahli Madya
teja@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan salah satu komitmen Indonesia yang tertuang di dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) No. 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan juga *Sustainable Development Goals/SDGs* yang menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2030. Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi seseorang hidup dengan pengeluaran kurang dari US\$1,9 per hari atau setara kurang lebih Rp45.000 per hari. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan ekstrem di Indonesia terus menurun dari tahun ke tahun. Pada Maret 2022, persentase penduduk miskin ekstrem sebesar 2,04%, kemudian turun menjadi 1,74% di bulan September 2022, dan 1,12% pada Maret 2023. Diperkirakan pada akhir 2023, angka kemiskinan ekstrem akan turun lagi menjadi 0,5%. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melaporkan terdapat 3,3 juta orang masuk dalam kategori miskin ekstrem dan terkonsentrasi di Indonesia bagian timur.

Upaya penurunan jumlah penduduk miskin termasuk penghapusan kemiskinan ekstrem di atas, selama ini telah dan akan terus dilanjutkan melalui tiga strategi, yaitu (1) pengurangan beban pengeluaran melalui program bantuan dan perlindungan sosial; (2) peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin; dan (3) pengurangan kantong-kantong kemiskinan melalui program peningkatan sarana dan prasarana permukiman khususnya di tingkat desa dan kawasan perdesaan. Dari segi anggaran, peningkatan anggaran perlindungan sosial mencapai Rp493,5 triliun pada 2024. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan APBN 2024 untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan pagu anggaran program pemberdayaan ekonomi 2024 senilai Rp76,3 triliun.

Kemiskinan ekstrem juga menjadi perhatian capres-cawapres yang maju pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024. Pasangan nomor urut 1 (Anis-Muhaimin) misalnya memiliki visi misi untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem dengan cara menekan angka kemiskinan ekstrem menjadi 0% pada 2026, dan fokus menanggulangi kemiskinan ekstrem di wilayah Nusa Tenggara. Sementara pasangan nomor urut 2 (Prabowo-Gibran) akan berupaya menekan angka kemiskinan ekstrem menuju 0% dalam 2 tahun pertama pemerintahan. Untuk kemiskinan non ekstrem sendiri ditargetkan di bawah 6% di akhir 2029. Terakhir, pasangan nomor urut 3 (Ganjar-Mahfud) bertekad untuk mewujudkan 0% kemiskinan ekstrem, dan secara bertahap mengurangi kemiskinan nonekstrem hingga 2,5% pada 2029.

Terdapat sejumlah tantangan dalam mencapai target kemiskinan ekstrem 0%. *Pertama*, kemiskinan ekstrem disebabkan oleh kondisi yang multidimensional. Salah satunya berkaitan erat dengan kualitas lingkungan karena penduduk di daerah miskin cenderung bergantung pada sumber daya alam untuk kelangsungan hidupnya. Diperlukan intervensi yang berkelanjutan untuk pengelolaan alam yang ramah lingkungan, sekaligus harus mampu menciptakan lapangan kerja.

Sementara itu perubahan iklim diperkirakan akan meningkatkan frekuensi dan tingkat keparahan guncangan alam, yang dapat menjebak rumah tangga miskin ke dalam kemiskinan dan mendorong rumah tangga yang tidak aman secara ekonomi kembali ke dalam kemiskinan. *Kedua*, sektor pertanian dan jasa dengan nilai tambah rendah merupakan pendorong utama pemberantasan kemiskinan. Namun, sektor tersebut seringkali tidak terlalu produktif atau tidak cukup untuk mendukung upaya seseorang keluar dari kemiskinan. *Ketiga*, dalam tatanan global kita dihadapkan pada kenyataan terjadinya kenaikan harga terutama berbagai komoditas pangan dan energi sebagai akibat dari situasi geopolitik Eropa yang hingga saat ini masih belum sepenuhnya berakhir.

Pemerintah dinilai perlu fokus pada dua kebijakan untuk dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrem. *Pertama*, penguatan jaring pengaman sosial dan peningkatan produktivitas. Hal ini guna menjaga agar masyarakat miskin dan rentan mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. *Kedua*, yaitu meningkatkan produktivitas dan lapangan kerja yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga bisa menambah pendapatan dan pada akhirnya masyarakat dapat keluar dari jurang kemiskinan.

Atensi DPR

Untuk mencapai target kemiskinan nasional, dibutuhkan upaya yang lebih intens dari sisi pemerintah, termasuk dalam melibatkan pelaku dan mitra non-pemerintah melalui pendekatan kolaboratif dan kemitraan pentahelix. Pada level makro, perlunya kebijakan agar bisa menjaga stabilitas inflasi dan bisa menumbuhkan ekonomi yang inklusif, serta menciptakan lapangan kerja. Sementara dari sisi mikro perlu adanya kebijakan yang mencakup kebijakan menurunkan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan kelompok miskin, melalui program ekonomi produktif.

Komisi VIII DPR RI perlu memastikan ketersediaan anggaran untuk mencapai target penurunan kemiskinan ekstrem hingga 0%, serta melakukan fungsi pengawasan kepada pemerintah terkait akurasi data, agar bantuan benar-benar tepat sasaran. Selain itu, Komisi VIII DPR RI bersama dengan pemerintah dapat merancang *pilot project* pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan kehidupan ekonomi berbasis kearifan lokal yang dapat membantu membangun kemandirian masyarakat tanpa bergantung pada bantuan sosial.

Sumber

antaranews.com, 23 Agustus 2023;
beritasatu.com, 12 Desember 2023;
ekonomi.bisnis.com, 21 Mei 2023;
greennetwork.id, 17 Oktober 2023;
kemenkopmk.go.id, 20 Desember 2023;
wapresri.go.id, 14 Desember 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

Ekkuinbang
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Monika Suhayati

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.